

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara Republik yang berdaulat, menggunakan sistem otonomi daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat. Diharapkan Otonomi Dearah ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah, yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan gubernur, bupati, atau walikota untuk mengurus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan pengelolaan bersama.

Ferida (2018) akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mencapai sukses tidaknya misi organisasi, dan tujuannya ditetapkan melalui media akuntabilitas yang dilaksanakan secara berkala. Secara umum, sistem pertanggungjawaban penyelenggara negara menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan nasional tertinggi. Keberhasilan kinerja organisasi sektor publik tidak hanya dapat diukur dari perspektif keuangan, tetapi untuk mengukur kinerjanya diperlukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja.

Ada beberapa prinsip dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, yaitu: (1) komitmen pimpinan dan seluruh pegawai organisasi terkait (2) didasarkan pada sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Tingkat pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (4) Untuk mencapai visi dan misi sebagai tujuan, serta hasil dan manfaat yang diperoleh (5) Jujur, obyektif, transparan dan akurat (6) Keberhasilan atau kegagalan kelompok yang mewakili tujuan yang dicapai. (Sumber: <http://www.e-akuntansi.com/principal-akuntantability-kinerja-di-indonesia/>)

Kenis (1979) mengatakan bahwa sistem anggaran memiliki beberapa karakteristik. Salah satu ciri anggaran adalah kejelasan tujuan anggaran. Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu dalam menetapkan tujuan anggaran. Selain itu, tujuan anggaran yang disusun akan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, target anggaran dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Daerah (RKPD).

Felida (2018) Perangkat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat. Pada gilirannya, ini akan mengurangi perbedaan antara anggaran yang disiapkan dan perkiraan terbaik organisasi. Putra (2016) desentralisasi menunjukkan tingkat otonomi daerah yang dilimpahkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Oleh karena itu, dalam organisasi desentralisasi di Indonesia seperti otonomi, OPD memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi adalah sejauh mana manajer senior mengizinkan manajer bawahan mereka untuk membuat keputusan independen. Untuk meningkatkan

kinerja OPD yang diharapkan setelah keputusan bisnis terdesentralisasi, organisasi harus mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan yang menggunakan sistem akuntansi untuk pelaporannya.

Reyhan (2017) Pengendalian akuntansi didefinisikan sebagai semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk memelihara atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini, pengendalian akuntansi mencakup sistem perencanaan, sistem pelaporan, dan prosedur pemantauan berbasis informasi. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa rencana tindakan atau standar telah dikembangkan untuk mengukur kinerja aktivitas. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, tindakan pengendalian harus dikembangkan agar keputusan dapat diambil sesuai dengan rencana.

Menurut definisi, pengendalian mengasumsikan saat rencana tindakan atau standar ditetapkan untuk mengukur kinerja pelaksana. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan agar keputusan dapat dibuat sejak awal sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pelaporan yang baik. Kewajiban Pemerintah ialah memberikan informasi keuangan dan lainnya kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan bidang ekonomi, sosial dan politik. Badan Tata Usaha Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) berkeyakinan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Kumolo (2016), dilihat dari penggunaan anggaran pemerintah daerah, sebanyak 92% APBD provinsi, kabupaten dan kota digunakan untuk biaya instansi negara. Idealnya, anggaran digunakan untuk belanja pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan. Junari (2018) Dewasa ini, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sering kali ditekankan karena sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak pemerintah daerah atau instansi pemerintah yang belum melaksanakan tata kelola sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu ketidaksesuaian tersebut adalah sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah, sistem pertanggungjawaban tersebut masih kurang baik, dan hasil evaluasi belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan kunjungan kerja Biro Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Nasional di Jawa Timur dari 12 hingga 14 Juli 2018, Kabupaten Ngawi mendapatkan penilaian tentang pengelolaan dana desa yang buruk dan laporan pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Karena dana dari 213 desa telah dialokasikan, sebanyak 133 desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (sumber: <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-13-b8bff84bbea9634849ae1b25d29452a6.pdf>)

LKPD merupakan bentuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab kepada publik atas kinerja pemerintah dalam suatu tahun anggaran. Mengukur, mengevaluasi, menganalisis proses kinerja Pemerintah Kabupaten Ngawi dan mengubahnya menjadi LKPD. Penyusunan LKPD bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing instansi daerah, serta keberhasilan

pelaksanaan capaian saat ini, guna mempercepat peningkatan kualitas hasil kinerja yang diharapkan di tahun mendatang. Dengan disusunnya LKPD tersebut juga dapat menguraikan penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan.

Dalam LHP BPK LKPD wilayah Ngawi tanggal 13 Mei 2019, LHP BPK bernomor 46.A / LHP / XVIII.SBY / 05/2019, kata BPK dalam laporan kinerja Pemda Ngawi terkait sistem pengendalian internalnya. Beberapa kekurangan, seperti pengelolaan persediaan di tujuh OPD. 22 BLUD tidak mencukupi, dan pengelolaan aset tetap pemerintah Kabupaten Ngawi tidak memadai. (Sumber: LHP LKPD Kab.Ngawi di halaman 217 BPK Jawa Timur). Selain mengaudit sistem pengendalian intern, BPK Jatim juga mengaudit kepatuhan. Hasil pemeriksaan BPK menemukan banyak OPD yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BPK, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) serta Jasa Perumahan dan Perumahan Rakyat di Jawa Timur Tengah, sebanyak Rp3.170.432.407,91 tidak digunakan untuk proyek pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. . Setelah dilakukan pengambilan sampel dan pengujian 38 paket pekerjaan konstruksi jalan, jaringan dan irigasi, ditemukan 28 paket pekerjaan yang mengalami cacat volume dan kualitas dengan nilai sebesar Rp 3.170.432.407,91.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat adalah OPD, yang bertanggung jawab atas berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Ngawi. Beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan kontrak DPUPR adalah: pemulihan jaringan irigasi Kleco, pemulihan jaringan irigasi kawis, pemulihan jaringan irigasi

dedak, dan pemulihan jaringan irigasi Babadan. Di antara empat paket pekerjaan, 341.411.458,58 rupee dijadikan sampel untuk pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Ngawi, anggaran yang semula digunakan untuk pembangunan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati realisasi APBD Ngawi. Adanya sistem akuntabilitas kinerja di pemerintahan yang dijadikan bahan setiap OPD untuk melapor kepada masyarakat atas nama DPRD diharapkan masyarakat dapat memahami anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Opini Kewo (2017) atas laporan keuangan mencerminkan kualitas tanggung jawab keuangan. Di Indonesia, praktik sistem akuntabilitas masih jauh dari harapan, seperti mekanisme pembelian barang dan jasa, sehingga akuntabilitas keuangan nasional menjadi fokus perhatian. Selain itu, dari segi waktu dan anggaran, tidak efisiennya pelaporan dan pelaksanaan keuangan pemerintah daerah juga menjadi masalah belum terpenuhinya tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Ini terutama karena sistem pengendalian internal tidak dapat beroperasi secara optimal.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (1) ada komitmen dari pimpinan instansi terkait dan seluruh pegawai (2) berdasarkan sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) . Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (4) untuk mencapai visi dan misi sebagai tujuan, serta hasil dan manfaat yang diperoleh (5) kejujuran,

objektivitas, transparansi, dan ketepatan (6) menunjukkan berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Penelitian Isnanto (2019) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran, hubungan antara pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukaharjo. Dalam studi Arona (2016) yang dilakukan oleh OPD Bengkalis menunjukkan tujuan anggaran yang jelas, hubungan antara desentralisasi dan sistem pelaporan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan untuk variabel kontrol akuntansi menunjukkan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bangladesh.

Berdasarkan kontradiksi di atas, peneliti memiliki motivasi untuk memeriksa tingkat kinerja SKDP di Kabupaten Ngawi, karena dari laporan audit yang dilakukan oleh BPK Jawa Timur banyak menemukan fakta mengenai kekurangan kinerja OPD Kabupaten Ngawi. Seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang (DPUPR), BPK menemukan banyak kegagalan dalam pelaksanaan kinerjanya, termasuk kegagalan proyek kerja 2017-2018 tersebut di atas. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang sistem akuntabilitas kinerja OPD di Kabupaten Ngawi yang berjudul "Dampak Kejelasan Tujuan Anggaran, Desentralisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah NGAWI" .

1.2 Rumusan Masalah

Bagi sektor publik anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran dan perencanaan sebagai proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. Anggaran sektor publik harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Maka dari itu, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Kabupaten Ngawi?
2. Apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Kabupaten Ngawi ?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Kabupaten Ngawi ?
4. Apakah Sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja OPDKabupaten Ngawi
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Desentralisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja OPDKabupaten Ngawi
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja OPD Kabupaten Ngawi
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja OPDKabupaten Ngawi .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu

:

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penganggaran Sektor publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta meningkatkan analisis tentang APBD .
2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini adalah OPD yang terdapat di Kabupaten Ngawi diharapkan sebagai sumbangan pikiran dalam melakukan penyusunan anggaran yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang penelitian yang sama.

